**PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELAKSANAAN ANGGARAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2019**

**(Studi Kasus: Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman)**

***EFFECT OF BUDGET PLANNING, QUALITY OF HUMAN RESOURCES AND BUDGET IMPLEMENTATION ON THE 2019 BUDGET ABSORPTION***

 ***(Case Study at the Sleman District Education Office****)*

Sulis Puji Rahayu, Akuntansi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh variabel perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada UPT, TK Negeri, SKB dan Bagian Keuangan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, (2) pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran pada UPT, TK Negeri, SKB dan Bagian Keuangan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dan (3) pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada UPT, TK Negeri, SKB dan Bagian Keuangan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif metode survey dengan data primer yang diperoleh dari data kuesioner yang diukur menggunakan skala likert. Penelitian ini dilakukan di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Populasi pada penelitian ini adalah Pegawai dengan Jabatan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman yang berjumlah 72. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *non Probability sampling yaitu sampling kuota*. Jumlah sampel penelitian adalah sebanyak 72 responden. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang kemudian diolah dengan menggunakan beberapa uji statistik, yaitu: uji Validitas dan reliabilitas, teknik analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisa regresi berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: (1) variabel perencanaan anggaran (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, (2) variabel kualitas sumber daya manusia (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, dan (3) variabel pelaksanaan angaran (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran

**Kata kunci:** Penyerapan Anggaran, Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pelaksanaan Anggaran.

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is to know the effect of budget planning, quality of human resource and budget implementation on budget absorption at the state kindergarten, technical service unit and studio learning activities. The research method used is quantitative research methods survey method with primary data obtained from questionnaire data measured using a Likert scale. This research was conducted in the Scope of the District Education Office in Sleman.*

 *The population in this study were Employees in the Budget User Position, Spending Treasurer, Commitment Making Officials in the Scope of the Sleman District Education Office totaling 72. The sampling technique used was non-probability sampling, that is the quota sample. The number of research samples is 72 respondents. The data of this study were collected using a questionnaire which was then processed using several statistical tests, namely: Validity and reliability tests, descriptive statistical analysis techniques, classic assumption tests, Multiple Regression Analysis and hypothesis tests.*

 *The results of this study state that: (1) budget planning variables (X1) have positive and significant effects on budget absorption, (2) human resource quality variables (X2) have positive and significant effects on budget absorption, and (3) budget implementation variables (X3) positive and significant effect on budget absorption*

***Keywords:*** *Budget Absorption, Budget Planning, Quality of Human Resources, Budget Implementation.*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Setiap tahunnya pemerintah daerah membuat rencana keuangan tahunan yang tertuang dalam Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (APBD) yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Termasuk Unit Pelayanan Teknis di masing-masing Dinas. Dalam pembuatan rencana keuangan tahunan atau anggaran memerlukan beberapa aspek penting yaitu perencanaan anggaran yang matang, kualitas sumber daya manusia tercukupi dan berkompeten, serta pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan yang direncanakan.

Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang telah disetujui untuk dibelanjakan.

Tingkat penyerapan anggaran pemerintah pusat dan daerah sering menjadi topik utama dibahas oleh para pengamat ekonomi sebagai salah satu indikator kegagalan birokrasi. Kegagalan target penyerapan anggaran memang berakibat hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah yang artinya ada dana yang menganggur. (Putri dkk, 2019)

Perencanaan anggaran, merupakan faktor penting dalam pengelolaan anggaran. Perencanaan anggaran disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dimana dokumen perencanaan ini memuat kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan secara utuh sasaran hasil kinerja pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang disebut dengan rencana kerja. Sehingga perencanaan yang tidak matang dalam penentuan anggaran yang disajikan akan berdampak pada program kerja yang tidak berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan tidak selarasnya antara perencanaan anggaran dan program kerja yang akan dilaksanakan, sehingga menjadi salah satu faktor penyebab minimnya penyerapan anggaran.

 Selain itu, penyerapan anggaran juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang merupakan komponen penting dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, karena sumber daya manusia selalu terkait dengan penetapan sasaran hingga evaluasi anggaran. Sumber daya manusia juga harus memiliki kompotensi yang baik, dimana kompetensi ini merupakan karakteristik dari seseorang yang mempunyai kemampuan, keterampilan dan pengetahuan untuk melakukan suatu pekerjaan. Apabila pemerintah memiliki kompetensi sumber daya manusia yang baik maka proses penyerapan anggaran dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan terserap dengan baik. (Saprudin, 2018). Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan anggaran, menurut Salwah (2019) Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan setelah proses perencanaan anggaran selesai. Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Proses pelaksanaan anggaran meliputi pengaturan terhadap pengunaan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, waktu pelaksanaannya dan dimana tempat pelaksanaannya. Proses pelaksanaan anggaran identik dengan proses pembayaran atas beban APBD, sehingga tertib administrasi menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan anggaran.

Penelitian pengaruh perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerarpan anggaran telah banyak dilakukan oleh para akademisi dan peneliti. Putri dkk (2017) menunjukkan bahwa Perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, dan Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Menurut saprudin (2018), kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara simultan terhadap penyerapan anggaran. Berbeda dengan penelitian Dewi dkk (2018) menunjukan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap penyerapan anggaran.

Berdasarkan penelitian sebelumnya terjadi perbedaan hasil penelitian *(research gap)*, dengan adanya perbedaan hasil tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran. Hasil penelitian tersebut tertuang dalam laporan skripsi dengan judul **“Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2019”.**

**RUMUSAN MASALAH**

1. Apakah perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran tahun 2019?
2. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran tahun 2019?
3. Apakah pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran tahun 2019?

**LANDASAN TEORI**

1. **LANDASAN TEORI**
2. Anggaran Pemerintah

Menurut Mahmudi (2016), Anggaran merupakan instrumen perencanaan dan pengendalian manajemen yang berperan penting dalam organisasi sektor pemerintah. Anggaran merupakan rencana jangka pendek organisasi yang dinyatakan dalam bentuk keuangan. Anggaran pemerintah yang dipresentasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menggambarkan tentang rencana keuangan dimasa depan.

1. Komponen Anggaran Pemerintah

Anggaran pemerintah terbagi menjadi 2 komponen yaitu:

1. Anggaran untuk pemerintah pusat yang dibagi dalam:
2. Anggaran rutin yang besarnya kira-kira 62 persen dari total pengeluaran meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan subsidi (BBM dan bukan BBM)
3. Anggaran pembangunan yang besarnya kira-kira 14 persen dari total pengeluaran meliputi pembiayaan rupiah dan pembiayaan proyek. Untuk anggaran pembangunan, peranan dana yang berasal dari negara-negara donatur saat ini masih cukup besar.
4. Anggaran belanja untuk daerah, yang besarnya kira-kira 24 persen dari total pengeluaran. Anggaran ini terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana tersebut di transfer ke pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten maupun kotamadya.
5. Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD)

Menurut (Hadade, 2018), Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah(APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.

Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD. Setiap penganggaran penerimaan dan pengeluaran dalam APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran. Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana ditetapkann dalam peraturan perundang-undangan.

1. Penyerapan Anggaran

Zaenur dan Ramdhani (2017) menjelaskan bahwa Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, penyerapan anggaran bukan merupakan target alokasi anggaran. Namun hingga kini, salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah adalah besarnya penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah merupakan akumulasi dari penyerapan anggaraan yang dilakukan oleh SKPD.

Menurut Noviwijaya & Rohman (2013) dalam jurnal Zaenur dan Ramdhani (2017), penyerapan anggaran satuan kerja adalah proporsi anggaran satuan kerja yang telah dicairkan atau direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Mengukur daya serap membutuhkan lebih dari sekedar membandingkan dana yang tersedia dan pengeluaran yang sebenarnya. Penyerapan anggaran yang akuntabel dan memenuhi prinsip *value of money* merupakan salah satu penerapan praktik tata kelola pemerintahan yang baik dan menjadi ukuran kinerja pemerintah. Meskipun penyerapan anggaran yang rendah bukan merupakan satu-satunya indikator untuk menilai keberhasilan kinerja keuangan pemerintah daerah, namum pemerintah daerah tetap harus menaruh perhatian terhadap ini.

Apabila hal ini terus terjadi, dapat dipastikan target kinerja yang telah ditetapkan tidak tercapai, dan ini berarti ada uang pemerintah daerah yang mengangur yang seharusnya dapat di investasikan pada tempat-tempat yang lebih produktif (BPKP, 2011).

Kondisi penyerapan anggaran yang rendah dan tidak proporsional menurut Miliasih (2012) dalam jurnal Zaenur dan Ramdhani (2017) akan berimplikasi pada :

1. Lambatnya pelaksanaan kegiatan/program pemerintah dan akan berpengaruh kepada pelayanan publik.
2. Penundaan pencairan dana untuk belanja barang/jasa menyebabkan fungsi stimulus fiskal dan multiflier effect dari belanja pemerintah terhadap aktivitas perekonomian masyarakat tidak optimal pada awal tahun anggaran.
3. Penumpukan tagihan kepada negara pada akhir tahun anggaran menyebabkan beban yang berat terhadap penyediaan uang / kas pemerintah, sehingga dapat memungkinkan terjadinya *cash mismatch*.
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran

Faktor-faktor yang memepengaruhi penyerapan anggaran adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Anggaran

Menurut Zaenur dan Ramdhani (2017), Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks perencanaan pembangunan pemerintah, maka penyusunannya terutama berpedoman pada UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk melaksanakan pembangunan pemerintah telah merencanakan target-target pembangunan dimasa mendatang.

Perencanaan anggaran, merupakan faktor penting dalam pengelolaan anggaran. Perencanaan anggaran disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dimana dokumen perencanaan ini memuat kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan secara utuh sasaran hasil kinerja pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang disebut dengan rencana kerja. Sehingga perencanaan yang tidak matang dalam penentuan anggaran yang disajikan akan berdampak pada program kerja yang tidak berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan tidak selarasnya antara perencanaan anggaran dan program kerja yang akan dilaksanakan, sehingga menjadi salah satu faktor penyebab minimnya penyerapan anggaran (Saprudin, 2018).

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut Ramdani dan Zaenur (2017), Pengembangan SDM pada intinya diarahkan untuk meningkatkan kualitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas. Hasil berbagai studi menunjukan bahwa kualitas SDM merupakan faktor penentu produktivitas, baik secara makro maupun mikro. Sumber Daya Manusia (SDM) secara makro adalah warga Negara yang telah memasuki usia angkatan kerja yang memiliki potensi untuk berperilaku produktif (dengan atau tanpa berpendidikan formal) yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri dan keluargannya, yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat di lingkungan bangsa atau negaranya (Badriyah, 2015).

Suharto (2012) dalam jurnal Ramdani dan Zaenur (2017) mendefinisikan kualitas sumber daya manusia sebagai kemampuan dari pegawai dalam menjalankan tugasnya dilihat dari kemahiran seseorang, latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan frofesionalisme dalam bekerja*.*

Matutina (2001) Kualitas kerja mengacu kepada kualitas sumber daya manusia yang mencakup komponen-komponen berikut :

1. Pengetahuan (*Knowledge*) yaitu kemampuan yang dimiliki pegawai lebih berorientasi pada intelenensi dan daya fikir serta penguasaan ilmu yang luas yang dimiliki pegawai.
2. Keterampilan (*Skill*) yaitu kemampuan dan penguasaan teknis operasional dibidang tertentu yang dimiliki pegawai.
3. Kemampuan (*Ability*) yanitu kemampuan yang terbentuk dari jumlah kompetensi yang dimiliki seseorang karyawan (pegawai) yang mencakup loyalitas, kedisiplinan, kerjasama dan tanggung jawab.
4. Pelaksanaan Anggaran

Menurut Salwah (2019) Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan setelah proses perencanaan anggaran selesai. Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Proses pelaksanaan anggaran meliputi pengaturan terhadap pengunaan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, waktu pelaksanaannya dan dimana tempat pelaksanaannya. Proses pelaksanaan anggaran identik dengan proses pembayaran atas beban APBD, sehingga tertib administrasi menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan anggaran.

Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan kegiatan yang dibuat oleh masing-masing pelaksanaan anggaran yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan kegiatan, maka dengan dilaksanakannya pelaksanaan anggaran berarti bahwa program dan rencana operasional tahunan yang dapat dianggarkan akan mulai dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai aturan. Pelaksanaan anggaran merupakan upaya-upaya untuk merealisasikan perencanaan anggaran yang telah dibuat. Pelaksanaan anggaran merupakan aktivitas yang dilaksanakan, yang terkait dengan penggunaan anggaran (dana) yang dimiliki oleh setiap SKPD yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD).

Dasar hukum pelaksanaan anggaran SKPD adalah DPA SKPD yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan DPA SKPD, para Kepala SKPD selaku pengguna anggaran mengajukan permintaan pengeluaran uang dari kas umum daerah. Kegiatan pengeluaran uang dari kas umum daerah atas beban APBD dilakukan berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD). Dalam melaksanakan anggaran belanja daerah beberapa hal yang harus dipedomani sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006, sebagai berikut:

1. Pengeluaran kas yang menjadi beban APBD tidak boleh dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan dicantumkan dalam lembaran daerah. Pengeluaran kas tersebut tidak termasuk pengeluaran untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
2. Dasar pengeluaran belanja untuk keperluan tak terduga yang dianggarkan dalam APBD (misalnya untuk mendanai tanggap darurat, bencana alam atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya) harus ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan tersebut ditetapkan;
3. Pimpinan instansi/lembaga penerima dan tanggap darurat harus bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada atasan langsung dan kepala daerah sesuai dengan tata cara pemberian dan pertanggungjawaban dana darurat yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah;

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.

1. Dokumen Perencanaan

Menurut Saprudin (2018), Perencanaan anggaran merupakan faktor penting dalam pengelolaan anggaran. Perencanaan anggaran disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dimana dokumen perencanaan ini memuat kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan secara utuh sasaran hasil kinerja pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang disebut dengan rencana kerja.

Sehingga perencanaan yang tidak matang dalam penentuan anggaran yang disajikan akan berdampak pada program kerja yang tidak berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan tidak selarasnya antara perencanaan anggaran dan program kerja yang akan dilaksanakan, sehingga menjadi salah satu faktor penyebab minimnya penyerapan anggaran.

1. Komitmen Organisasi

Menurut Lestari Dewi Dkk (2017), Komitmen organisasi dapat tercipta jika organisasi/perusahaan memberi dorongan, respek, menghargai kontribusi dan memberi apresiasi bagi individu dalam pekerjaannya.

Hal ini berarti, jika organisasi peduli dengan keberadaan dan kesejahteraan personal anggota/pegawai dan juga menghargai kontribusinya, maka anggota/pegawai akan meningkatkan komitmennya terhadap organisasi. Komitmen organisasi dalam penelitian Mia Ranisa Dkk (2017), Pegawai yang berkomitmen terhadap pencapaian tujuan akan berusaha keras untuk mencapainya dan mendukung sepenuhnya nilai dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi. Pada pemerintahan daerah, tujuan yang ingin dicapai adalah salah satunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu dibutuhkan anggaran untuk pelaksanaannya. Pegawai dengan komitmen yang tinggi akan berusaha program dan kegiatan yang telah dianggarkan dapat terlaksana dengan baik. Menurut Roe (2000) dalam penelitian Isilda Alumbida Dkk (2016), Komitmen Organisasi adalah tingkatan dimana seseorang memposisikan dirinya pada organisasi dan kemauan untuk melanjutkan upaya pencapaian kepentingan organisasinya.

1. Komitmen Manajemen

Menurut Juliani dan Solichin (2014) dalam Jurnal Lilik Dkk (2017), Manajemen memberikan kontribusi berupa waktu yang diperlukan, sumber daya, dan pendekatan positif sehingga perannya dalam memengaruhi keberhasilan organisasi dapat dipenuhi. Komitmen manajemen dapat diwujudkan dengan penekanan oleh manajemen pada pelatihan, pemberdayaan, dan penghargaan. Dukungan manajemen puncak dapat digunakan untuk mencapai kesuksesan implementasi karena para manajer dapat memfokuskan pada sumber daya, tujuan, dan strategi yang diperlukan. Komitmen seluruh SKPD dibutuhkan dalam pelaksanaan penyerapan anggaran.

1. Karakteristik Tujuan Anggaran

Menurut Munawar (2006) dalam Jurnal Lilik Dkk (2017), karakteristik tujuan anggaran yaitu partisipasi anggaran (*budgetary participation*), kejelasan sasaran anggaran (*budget goal clarity*), umpan balik anggaran (*budgetary feedback*), evaluasi anggaran (*budgetray evaluation*) dan kesulitan sasaran anggaran (*budget goal difficulty*).

Karakteristik tujuan anggaran dapat berpengaruh terhadap sikap yang terkait dengan pekerjaan dan sikap yang terkait dengan anggaran. Pengetahuan mengenai tujuan yang telah dianggarkan dan informasi mengenai tingkat dimana tujuan tersebut telah tercapai memberikan dasar bagi para manajer untuk mengukur efisiensi, mengidentifikasi masalah, danmengontrol biaya.

Dalam hal waktu dan besarannya, koordinasi berbagai aktivitas fungsional juga dicapai melalui proses pembuatan dan penerapan anggaran.

1. Lingkungan Birokrasi

Menurut Lilik Dkk (2017), Birokrasi memainkan peran ganda, yaitu menyediakan kemampuan pemberdayaan berbagai komponen dengan berbagi wewenang dan menjamin penyediaan barang publik kepada masyarakat. Penyediaan barang/jasa pemerintah pada praktiknya sering sekali terkendala alasan birokratis dalam realisasinya sehingga anggaran yang sudah dialokasikan untuk penyediaan barang/jasa pemerintah tidak terserap. Kondisi atau keadaan yang ada pada pemerintah daerah akan sangat memengaruhi berjalan lacar atau tidak kegiatan mereka. Lingkungan birokrasi memengaruhi penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa seperti perencanaan, aturan, prosedur, koordinasi, dan persyaratan dokumen.

**KERANGKA KONSEPTUAL**

****

**Gambar 2. 1** Kerangka Teoritis

1. Pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran

Menurut Ramdhani dan Zaenur (2017) dalam upaya mempercepat penyerapan anggaran, memperkuat perencanaan seperti ketepatan alokasi dan penentuan kegiatan perlu dilakukan agar pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dan dapat berjalan lancar. Selain itu perlu ditegaskan kepada Organisasi Perangkat Daerah agar mempertajam program dan rencana kerja dengan melakukan seleksi terhadap usulan kegiatan sehingga alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan agar dapat menghindari inefesiensi dan meningkatkan fleksibilitas SKPD (Zarinah, 2016).

Perencanaan anggaran, merupakan faktor penting dalam pengelolaan anggaran. Perencanaan anggaran disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dimana dokumen perencanaan ini memuat kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan secara utuh sasaran hasil kinerja pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang disebut dengan rencana kerja. Sehingga perencanaan yang tidak matang dalam penentuan anggaran yang disajikan akan berdampak pada program kerja yang tidak berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan tidak selarasnya antara perencanaan anggaran dan program kerja yang akan dilaksanakan, sehingga menjadi salah satu faktor penyebab minimnya penyerapan anggaran (Saprudin, 2018).

Perencanaan anggaran yang baik akan mempermudah implementasi pelaksanaan anggaran, sehingga apabila dikaitkan dengan pengelola keuangan, hal ini akan mempengaruhi serapan anggaran. Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Perencanaan Anggaran berpengaruh positif pada Penyerapan Anggaran

1. Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran

Menurut Lilik dkk (2017), bahwa organisasi sektor *private* atau publik perlu membangun sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan memiliki kompetensi yang tinggi. SDM yang berkompetensi tinggi akan menjadi keunggulan tersendiri dalam sebuah organisasi sekaligus sebagai pendukung daya saing organisasi dalam era globalisasi dan menghadapi lingkungan kerja serta kondisi sosial masyarakat yang mengalami perubahan yang dinamis. Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran.

Hal ini sesuai dalam penelitian Putri dkk (2017) yang berjudul “Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran” dengan hasil penelitian semakin tinggi kualitas yang dimiliki makan semakin baik dalam hal penyerapan anggaran, sehingga variabel kualitas sumber daya manusia, berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hal tersebut sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramdhani dkk (2017), Lilik dan Djoko (2017), Putri dkk (2017) yang menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2: Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran

1. Pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran

Pelaksanaan anggaran merupakan implementasi perencanaan anggaran yang telah di susun. Faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan anggaran adalah kualitas sumber daya manusia serta perencanaan anggaran. Adapun yang terpenting dalam pelaksanaan anggaran adalah proses pelaksanaan anggaran itu sendiri. Proses pelaksanaan anggaran meliputi persoalan-persoalan yang terjadi dalam internal satker, proses pengadaan barang dan jasa, serta proses mekanisme pembayaran (pencairan anggaran). Ketiga hal tersebut mempengaruhi besar kecilnya penyerapan anggaran. (Malahayati, 2015) dalam Ramdhani dan Zaenur (2017).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arfah Salwah (2019), Malahayati dkk (2019), Dandan Ramdani dan Indi Zaenur Anisa (2017) menyebutkan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis dirumuskan :

H3: Pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran

**METODE PENELITIAN**

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian kuantitatif dengan metode survey. Menurut Sugiyono (2019), metode survey merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah, tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, tes, dan wawancara terstruktur.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 17 UPT Pelayanan Pendidikan, TK Negeri, SKB, dan Bagian Keuangan yang ada di Dinas Kabupaten Sleman dengan mengedarkan kuesioner kepada pengguna anggaran, PPK, Bendahara Pengeluaran yang ada di masing-masing wilayah tersebut.

1. Populasi Dan Sampel Penelitian

Nuryadi dkk (2017) menyebutkan bahwa populasi adalah seluruh objek yang menjadi sasaran penelitian atau pengamatan dan memiliki sifat-sifat yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai dengan jabatan pengguna anggaran, PPK, dan Bendahara Pengeluaran di lingkup Dinas Pendidikan Sleman.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan objek pengamatan langsung dan dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan. Dengan kata lain, populasi adalah himpunan keseluruhan objek yang diteliti, sedangkan sampel adalah bagian yang di ambil dari populasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *Non Probability Sampling* yaitu *Sampling Kuota.* Menurut Sugiyono (2019), *Sampling Kuota* merupakan teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan.

Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang terlibat langsung dalam proses penganggaran diantaranya pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, dan bendahara pengeluaran yang ada di UPT Pelayanan Pendidikan, TK Negeri, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

1. Jenis Dan Sumber Data

 Jenis Data dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari obyek yang dijadikan penelitian, yaitu pengguna anggaran, PPK, dan bendahara pengeluaran di UPT Pelayanan Pendidikan Dinas Pendidikan, TK Negeri, SKB, dan Bagian Keuangan di Dinas Pedidikan Kabupaten Sleman.

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode survey dengan cara peninjauan secara langsung di instansi yang berkaitan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan melalui kuisioner. Menurut Sugiyono (2019), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Penelitian ini menggunakan skala pengukuran yaitu skala likert. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan akan menghasilkan data kuantitatif (Sugiyono, 2019). Skala likert yang digunakan adalah sebagai berikut:

Skor 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor 2 = Tidak Setuju (TS)

Skor 3 = Ragu-Ragu

Skor 4 = Setuju (S)

Skor 5 = Sangat Setuju (SS)

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian
	1. Variabel Penyerapan Anggaran (Y)

Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah penyerapan anggaran. Menurut Noviwijaya dan Rohman (2013) dalam Zaenur (2017), penyerapan anggaran merupakan proporsi anggaran satuan kerja yang telah dicairkan atau direalisasikan dalam satu tahun anggaran.

Menurut Zarinah (2016) dalam Zaenur (2017), Presentasi realisasi terhadap belanja :

1. Perbandingan realisasi anggaran dengan target penyerapan anggaran
2. Realisasi pertriwulan
3. Konsistensi dalam pelaksanaan program/kegiatan
4. Ketepatan waktu Jadwal penyerapan setiap bulan

Sedangkan variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah:

* 1. Variabel Perencanaan Anggaran (X1)

Menurut Mardiasmo (2009) dalam Zaenur (2017), perencanaan anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Menurut Zarinah (2016) dalam Zaenur (2017), dalam Proses perencanaan anggaran terdiri dari:

1. Partisipasi
2. Akurasi data
3. Pengesahan APBD
4. Pendekatan dan instrument dalam penyusunan anggaran
5. Perencanaan dan kebutuhan
6. Revisi atau perubahan
	1. Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X2)

Menurut Sutrisno (2014) dalam Zaenur (2017), kualitas sumber daya manusia merupakan Sumber daya yang memiliki akal, perasaaan, keinginan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dorongan daya dan karya (rasio, rasa dan karsa) serta memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Kemampuan yang dimiliki seseorang menurut Zarinah (2016) dalam Zaenur (2017) antara lain :

1. Kemampuan
2. Pengetahuan
3. Pengalaman
4. Keterampilan
5. Pelatihan
6. Pendidikan
	1. Variabel Pelaksanaan Anggaran (X3)

Menurut BPKP (2011) dalam Zaenur (2017), Pelaksanaan anggaran merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan di tetapkan.

Menurut Malahayati (2015) dalam Zaenur (2017), Pelaksanaan anggaran diukur dengan :

1. Penyelesaian Administrasi
2. Penentuan harga perkiraan sendiri(HPS)
3. Jadwal Anggran Kas

**METODE ANALISA DATA**

Metode analisis data menggunakan uji kualitas data, teknik analisa data, uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda: Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah berupa statistic deskriptif. Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisa data, dalam nenganalisis digunakan SPSS (Statistical Package for social Science), yaitu software yang berfungsi untuk menganalisis data dan melakukan perhitungan statistic baik parametik maupun non parametik dengan basis windows (Ghozali,2013). Tahapan dalam penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heterokedastisitas dan, uji signifikan parameter individual (uji t) dan analisis regresi dengan model regresi:

Y= α +β1X1 + β2 X2 + β3 X3 + *e*

Dimana:

Y = Penyerapan Anggaran

X1 = Perencanaan Anggaran

X2 = Kualitas Sumber Daya Manusia

X3 = Pelaksanaan Anggaran

β1 = Koefisien Perencanaan Anggaran

β2 = Koefisien Kualitas Sumber Daya Manusia

β3 = Koefisien Pelaksanaan Anggaran

*e*= Error term

**Hasil Uji Regresi Berganda**

Tabel 4. 17 Regresi Linear berganda

**Coefficientsa**



a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Sumber: Data yang Diolah Tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.17 di atas, dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 0,204 dan koefisien regresi Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran sebesar 0,430, 0,143, 0,336, sehingga hasil tersebut dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

Persamaan regresi linier berganda:

Y = 0,204 + 0,430X1 + 0,143X2+ 0,336X3+ *e*

Penjelasan persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persamaan regresi memiliki nilai konstanta positif menunjukkan pengaruh positif variabel perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan pelaksanaan anggaran. Jika variabel independen naik atau berpengaruh dalam satu satuan maka variabel penyerapan anggaran naik atau dipengaruhi.
2. Nilai koefisien regresi Perencanaan Anggaran sebesar 0,430 berarti jika variabel Perencanaan Anggaran bertambah satu satuan dengan asumsi variabel independen yang lain tetap, maka tingkat Penyerapan Anggaran akan naik sebesar 0,430.
3. Nilai koefisien regresi Kualitas Sumber Daya Manusia sebesar 0,143 berarti jika variabel Kualitas Sumber Daya Manusia bertambah satu satuan dengan asumsi variabel independen yang lain tetap, maka nilai Penyerapan Anggaran akan naik sebesar 0,143.
4. Nilai koefisien regresi Pelaksanaan Anggaran sebesar 0,336 berarti jika variabel Pelaksanaan Anggaran bertambah satu satuan dengan asumsi variabel independen yang lain tetap, maka nilai Penyerapan Angaran akan naik sebesar 0,336.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran (Uji Parsial t-test)**

Berdasarkan tabel 4.17 di atas, dapat dilihat bahwa nilai t hitung sebesar 4,740. Jika dibandingkan dengan t tabel pada tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 1,99547, maka nilai t hitung lebih besar dari t tabel (4,740 > 1,99547). Nilai sig sebesar 0,000 pada tabel 4.17 menunjukkan bahwa Perencanaan Anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap Penyerapan Anggaran. Hal ini disebabkan nilai Sig 0,000 pada tabel 4.17 lebih kecil dari nilai ɑ = 5%.

Berdasarkan uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Perencanaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa “Perencanaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2019” dapat diterima.

1. **Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran (Uji Parsial t-test)**

Berdasarkan tabel 4.17 di atas, dapat dilihat bahwa nilai t hitung sebesar 2,085. Jika dibandingkan dengan t tabel pada tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 1,99547, maka nilai t hitung lebih besar dari t tabel (2,085 > 1,99547). Nilai sig sebesar 0,041 pada tabel 4.17 menunjukkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh secara signifikan terhadap Penyerapan Anggaran.

Berdasarkan uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa “Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten SlemanTahun 2019” diterima.

1. **Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran (Uji Parsial t-test)**

Berdasarkan tabel 4.17 di atas, dapat dilihat bahwa nilai t hitung sebesar 2,674. Jika dibandingkan dengan t tabel pada tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 1,99547, maka nilai t hitung lebih besar dari t tabel (2,674 > 1,99547). Nilai sig sebesar 0,009 pada tabel 4.17 menunjukkan bahwa Pelaksanaan Anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap Penyerapan Anggaran. Hal ini disebabkan nilai Sig 0,009 pada tabel 4.17 lebih kecil dari nilai ɑ = 5%.

Berdasarkan uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Pelaksanaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2019” dapat diterima.

**Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan data yang diolah dengan bantuan SPSS versi 20.0, maka dapat disimpulkan mengenai hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

1. **Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran**

Hipotesis 1 yang diajukan dalam penelitian ini yaitu perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel (4,740 > 1,99547). Dan nilai Sig 0,000 lebih kecil dari nilai ɑ = 5%. Hasil yang didapat sesuai dengan penelitian Ramdhani dan Zaenur (2017) yang menyatakan bahwa dalam upaya mempercepat penyerapan anggaran, memperkuat perencanaan seperti ketepatan alokasi dan penentuan kegiatan perlu dilakukan agar pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dan dapat berjalan lancar. Sehingga variabel perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran

Selain itu perlu ditegaskan kepada Organisasi Perangkat Daerah agar mempertajam program dan rencana kerja dengan melakukan seleksi terhadap usulan kegiatan sehingga alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan agar dapat menghindari inefesiensi dan meningkatkan fleksibilitas SKPD (Zarinah, 2016). Perencanaan anggaran yang baik akan mempermudah implementasi pelaksanaan anggaran, sehingga apabila dikaitkan dengan pengelola keuangan, hal ini akan mempengaruhi serapan anggaran.

1. **Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran**

Hipotesis 2 yang diajukan dalam penelitian ini yaitu kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 2,085. Jika dibandingkan dengan t tabel pada tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 1,99547, maka nilai t hitung lebih besar dari t tabel (2,085 > 1,99547). Nilai sig sebesar 0,041 menunjukkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh secara signifikan terhadap Penyerapan Anggaran.

 Hal ini sesuai dalam penelitian Putri dkk (2017) yang berjudul “Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran” dengan hasil penelitian semakin tinggi kualitas yang dimiliki makan semakin baik dalam hal penyerapan anggaran, sehingga variabel kualitas sumber daya manusia, berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hal tersebut sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramdhani dkk (2017), Lilik dan Djoko (2017), Putri dkk (2017) yang menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran

1. **Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan anggaran**

Hipotesis 3 yang diajukan adalah pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hal ini didukung dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel (2,674 > 1,99547). Nilai sig sebesar 0,009 menunjukkan bahwa Pelaksanaan Anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap Penyerapan Anggaran.

Hal ini disebabkan nilai Sig 0,009 lebih kecil dari nilai ɑ = 5%. Penjelasan Malahayati (2015) dalam jurnal Ramdhani dan Zaenur (2017) Pelaksanaan anggaran merupakan implementasi perencanaan anggaran yang telah di susun. Faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan anggaran adalah kualitas sumber daya manusia serta perencanaan anggaran. Adapun yang terpenting dalam pelaksanaan anggaran adalah proses pelaksanaan anggaran itu sendiri.

Proses pelaksanaan anggaran meliputi persoalan-persoalan yang terjadi dalam internal satker, proses pengadaan barang dan jasa, serta proses mekanisme pembayaran (pencairan anggaran). Ketiga hal tersebut mempengaruhi besar kecilnya penyerapan anggaran. Dan Hasil penelitian yang dilakukan oleh Salwah (2019), Malahayati dkk (2019), Ramdani dan Anisa (2017) menyebutkan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

**KESIMPULAN**

1. KESIMPULAN
2. Perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tahun 2019.
3. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tahun 2019.
4. Pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tahun 2019.
5. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diusulkan saran yang dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Belum banyak diadakan bimtek perencanaan anggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, sehingga perlu diadakan lebih banyak lagi mengenai bimtek cara menyusun rencana anggaran yang baik, agar perencanaan anggaran realisasi dalam penyerapan anggaran sesuai dengan target , sehingga dapat meningkatkan penyerapan anggaran.
2. Kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatan lagi, dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang baik, tingkat penyerapan anggaran menjadi semakin tinggi.
3. Penelitian ini menggunakan 72 responden dalam yang merupakan pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, dan bendahara pengeluaran yang sesuai dengan ketugasan masing-masing, sehingga, penyerapan dipengaruhi oleh ketiganya dan faktor lainnya. Untuk itu, penelitian selanjutnya diharapkan jika menggunakan 3 variabel ini dapat dikembangkan dalam jumlah responden yang lebih luas dan banyak cakupannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

BPKP. 2011. *Menyoal Penyerapan Anggaran.* Yogyakarta: Paris Review.

Dewi, Ni Luh Putu Lestari, A.A.N.B. Dwirandra dan Made Gede Wirakusuma. 2017. *Kemampuan Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kompetensi SDM pada Penyerapan Anggaran Pemerintah Kabupaten Tabanan*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Vol 6 (4).

Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPPS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hadade, Ikhsan Muhammad. *Fungsi Anggaran Dalam Berbagai Aspek*, diakses dari <http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2018/02/13/fungsi-anggaran-dalam-berbagai-aspek/>, pada tanggal 6 Juli 2020.

Igbal, Muhammad.2018. *Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Kabupaten Polewali Mandar).* Tesis. Makasar: Program Magister AkuntansiFakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.

|  |
| --- |
| Krestiawan, Luky. 2015. *PengaruhPenerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Ponorogo).* Tesis. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. |

Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: uii press yogyakarta.

Mastuti, Denita Lilik, suharno dan Djoko Kristianto. 2017. *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran, Lingkungan Birokrasi, Komitmen Manajemen, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran (Survei Pada Kelurahan Banjarsari).* Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol 13 (3).

|  |
| --- |
| Nuryadi, N., Astuti, T. D., Sri Utami, E., & Budiantara, M. (2017). *Dasar-Dasar Statistik Penelitan*. |

Permendagri No. 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Putri, Kadek Mia Ranisa, Gede Adi Yuniarta dan Made Aristia Prayudi. 2018. *Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran (Survei Pada SKPD di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali*). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha Vol 8 (2).

Ramdhani, Dadan, dan Indi Zaenur Anisa. 2017. *Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Aanggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.* Jurnal Riset Akuntansi Terpadu Vol 10 (1)

Salwah, Arfah. 2019. *Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Kota Banda Aceh.*Jurnal Transformasi Administrasi, Vol 9 (2).

|  |
| --- |
| Saprudin, S. (2018). *Pengaruh Dokumen Perencanaan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango*. Gorontalo Accounting Journal, Vol 1 (2). |

Sugiyono. 2019. *Statistika Untuk Penelitian.* Bandung:CV Alfabeta

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D.* Bandung: CV Alfabeta.

Tugas Pokok dan Fungsi. Diakses dari <https://disdik.slemankab.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>. Pada Tanggal 7 Juni 2020.

Visi dan Misi. Diakses dari <https://disdik.slemankab.go.id/visi-dan-misi/>. Pada Tanggal 7 Juni 2020.